

Daftar Isi

Tentang Penulis	iii
Dalam Kenangan	v
Prakata	vii
Catatan untuk Rekan Pengajar	ix
Ucapan Terima Kasih	xiii
Daftar Isi	xv
Daftar Singkatan	xxi
BAGIAN I—Pengantar Akuntansi Forensik	1
BAB 1—Akuntansi Forensik	3
Akuntansi Forensik	3
Disiplin dan Profesi Forensik Lainnya	5
Akuntan Forensik di Pengadilan	8
Sengketa	10
Akuntansi atau Audit Forensik	12
Praktik Akuntansi Forensik di Indonesia	13
Akuntan Forensik Sektor Publik	17
Beberapa Model Akuntansi Forensik	18
Segitiga Akuntansi Forensik	21
FOSA dan COSA	24
Sistematika FOSA atau COSA	26
Penutup	32
Catatan Kaki	35
<i>Lampiran</i>	36
BAB 2—Mengapa Akuntansi Forensik?	43
Pengantar	43
Corporate Governance	44
Corruption Perceptions Index	50
Global Corruption Barometer	56
Bribe Payers Index	62
Korupsi dan Iklim Investasi—Kajian PERC	66
Global Competitiveness Index	68
Apakah Kajian mengenai Korupsi Bermanfaat?	72
Survei Integritas oleh KPK	75
Penutup	80
Catatan Kaki	81
BAB 3—Lingkup Akuntansi Forensik	83
Pengantar	83
Praktik di Sektor Swasta	84
Asset Recovery	88
Fraud dan Akuntansi Forensik	93
Praktik di Sektor Pemerintahan	93
Akuntansi Forensik di Sektor Publik dan Swasta	93
Penutup	94
Catatan Kaki	95
<i>Lampiran</i>	96
BAB 4—Atribut dan Kode Etik Akuntan Forensik serta Standar Audit Investigatif	99
Pengantar	99
Atribut Seorang Akuntan Forensik	99
Karakteristik Seorang Pemeriksa Fraud	104
Kualitas Akuntan Forensik	106
Independen, Objektif, dan Skeptis	106
Kode Etik Akuntan Forensik	107
Pelaksanaan Kode Etik	110
Standar Audit Investigatif	115
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara	118
Standar Akuntansi Forensik	121
Catatan Kaki	124
<i>Lampiran</i>	125

BAB 5—Tatanan Kelembagaan 131

- Pengantar 131
- Tatanan Kelembagaan 132
- Lembaga Pemberantasan Korupsi 144
- Interaksi Antarlembaga dalam Memberantas Korupsi 153
- KPK Diaudit BPKP? 155
- Anti-Corruption Agencies 164
- Landskap Audit Pemerintahan 165
- Pengadilan Tipikor 182
- Catatan Kaki 183

BAGIAN II—Fraud 187**BAB 6—Fraud 189**

- Pengantar 189
- Fraud dalam Perundangan Kita 190
- Beberapa Statistik Kejahatan di Indonesia 192
- Fraud dalam KUHP 194
- Fraud Tree (Pohon Fraud) 195
- Akuntan Forensik dan Jenis Fraud 204
- Manfaat Fraud Tree 205
- Pressure 207
- Perceived Opportunity 211
- Rationalization 212
- 2008 Report To The Nation 214
- Catatan Kaki 221

BAB 7—Korupsi 223

- Pengantar 223
- Pendekatan Sosiologi 224
- Delapan Pertanyaan tentang Korupsi 225
- Korupsi-Tinjauan Sosiologis 233
- Korupsi-Tinjauan Sosiologis Aditjondro 238
- Laporan Khusus Time tentang Soeharto Inc. 242
- Beberapa Perkembangan Terakhir 249
- Penutup 264
- Catatan Kaki 268

BAB 8—Mencegah Fraud 271

- Pengantar 271
- Gejala Gunung Es 272
- Pelajaran dari Report to the Nation 274
- Pengendalian Intern 275
- Fraud-Specific Internal Control 277
- Pengendalian Intern Aktif 278
- Pengendalian Intern Pasif 281
- Dapatkah Kita Memercayai Pengendalian Intern? 284

Catatan Kaki 284

BAB 9—Mendeteksi Fraud 285

- Pengantar 285
- Kesenjangan antara Kenyataan dan Harapan 286
- Mengenalkan Standar Audit untuk Menemukan Fraud 292
- Audit Umum dan Pemeriksaan Fraud 293
- Pelajaran dari Report to the Nation 294
- Teknik Pemeriksaan Fraud 295
- Catatan Kaki 296

BAB 10—Profil Pelaku, Korban, dan Perbuatan Fraud 297

- Pengantar 297
- Profiling 297
- Profiling dalam Kejahatan Terorganisasi 299
- Semacam Profiling: Contoh Perpajakan di Zaman Penjajahan Belanda 301
- Profil Korban Fraud 301
- Profiling terhadap Perbuatan (Kejahatan, Fraud, dan Lain-lain) 302
- Latihan Profiling 304
- Catatan Kaki 304

Lampiran 305**BAGIAN III—Teknik-teknik Audit Investigatif 311****BAB 11—Tujuan Audit Investigatif 315**

- Pengantar 315
- Contoh dari Tujuan Investigasi 315
- Penutup 319

BAB 12—Investigasi dan Audit Investigatif 321

- Pengantar 321
- Aksioma dalam Investigasi 322
- Latihan mengenai Aksioma Fraud 325
- Pertemuan Pendahuluan 328
- Predication 330
- Pemeriksaan dalam Hukum Acara Pidana 342
- Bukti dan Pembuktian-Auditing dan Hukum 346
- Catatan Kaki 347

BAB 13—Audit Investigatif dengan Teknik Audit 349

- Pengantar 349
- Kunci Keberhasilan 351
- Teknik-teknik Audit 351

Memeriksa Fisik dan Mengamati	351	Pedoman dan Petunjuk	447
Meminta Informasi dan Konfirmasi	353	Investigasi Pengadaan	447
Memeriksa Dokumen	353	Diagram	451
Review Analitikal	353	Contoh-contoh Kasus	453
Menghitung Kembali	359	Penutup	455
Penutup	359	Catatan Kaki	456
Catatan Kaki	361	BAB 18—Computer Forensics	459
BAB 14—Audit Investigatif dengan	363	Pengantar	459
Teknik Perpajakan	363	Computer Forensic dalam Kehidupan Sehari-	462
Pengantar	363	hari	462
Net Worth Method	363	Computer Forensics	462
Expenditure Method	368	Spesifikasi dari Disk Imaging Tool	468
Penerapannya di Indonesia	370	Cloning atas Data dalam Ponsel	471
BAB 15—Follow The Money	373	Mengenali Bukti Digital	472
Pengantar	373	Perspektif Hukum dari Bukti Digital	476
Naluri Penjahat	374	Catatan Kaki	477
Kriminalisasi dari Pencucian Uang	376	Lampiran	478
Terorisme dan Pencucian Uang	377	BAB 19—Wawancara dan Interogasi	491
Follow The Money dan Data Mining	386	Pengantar	491
Mata Uang Kejahatan	386	Perbedaan antara Wawancara dan Interogasi	494
Catatan Kaki	387	Manfaat Melakukan Wawancara Sebelum	497
BAB 16—Audit Investigatif dengan	389	Interogasi	497
Menganalisis Unsur Perbuatan Melawan	389	Wawancara	498
Hukum	389	Behavior Symptom Analysis (BSA) dan Saluran	505
Pengantar	389	Komunikasi	505
30 Jenis Tindak Pidana Korupsi	396	Verbal Behavior	506
Tindak Pidana Lain Berkaitan dengan	398	Paralinguistic Behavior	512
Tipikor	398	Nonverbal Behavior	516
Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi	398	Catatan Akhir	524
Beberapa Konsep Undang-undang	416	Interogasi	525
Analisis Beberapa Kasus Korupsi	424	Catatan Kaki	548
Kasus Akbar Tandjung	424	Lampiran	549
Kasus Samadikun Hartono	427	BAB 20—Operasi Penyamaran	567
Kasus Djoko S. Tjandra	428	Pengantar	567
Kasus Mohamad (Bob) Hasan	428	Istilah Operasi Penyamaran	568
Catatan Kaki	430	Pengedaran Senjata Api Ilegal	583
BAB 17—Investigasi Pengadaan	431	Undercover Operations	585
Pengantar	431	Tujuan Undercover Operations	586
Sistem Pengadaan Indonesia Tidak	437	Beberapa Masalah dalam Melakukan Covert	587
Berfungsi	437	Operations	587
Mengapa Kerangka Akuntabilitas untuk	439	Penjebakan (Entrapment)	587
Pengadaan Gagal	439	Surveillance	588
Beberapa Kasus yang Dilaporkan Bank Dunia	441	Sumber dan Informan	589
Ketentuan Perundang-undangan	444		

- Penggunaan Operatives 590
 Pertanyaan mengenai Operasi Penyamaran 590
Lampiran 593
- BAB 21—Peniup Peluit 605**
 Pengantar 605
 UU Perlindungan Saksi dan Korban 607
 Pedoman Whistleblowing System 610
 Whistleblower di Amerika Serikat 613
 Persons of the Year 2002 614
 Seorang Akuntan Forensik Menjadi Whistleblower 616
 Peniup Peluit di Indonesia 618
 Pertanyaan untuk Diskusi 638
 Agus Condro Prayitno 640
 Catatan Kaki 644
Lampiran 645
- BAGIAN IV—Ketentuan Perundang-undangan 649**
- BAB 22—Hukum Acara Pidana 657**
 Pengantar 657
 Tujuan Hukum Acara Pidana 658
 Asas yang Mengatur Perlindungan 659
 Asas-asas Hukum Acara Pidana 660
 Penyelidik, Penyidik, dan Tugas Mereka 662
 Jaksa, Penuntut Umum, dan Penuntutan 663
 Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana 663
 Penyitaan dan Penggeledahan 663
 Penangkapan dan Penahanan 664
 Mengadili, Pra-Peradilan, dan Putusan Pengadilan 664
 Surat Dakwaan 664
 Ruang Sidang 665
 Bukti, Barang Bukti, dan Alat Bukti 666
 Nilai Pembuktian dari Alat Bukti 667
 Upaya Hukum 670
 Mafia Peradilan 671
 Mengawasi Peradilan 673
 Catatan Kaki 674
Lampiran 675
- BAB 23—Hukum Acara Perdata 685**
 Pengantar 685
 Asas-asas Hukum Acara Perdata 685
 Penggugat, Tergugat, dan Kuasa/Wakil 686
 Surat Gugatan 687
 Alat Bukti 687
 Bentuk-bentuk Putusan Hakim 690
 Catatan Kaki 690
- BAB 24—Undang-Undang Bidang Keuangan Negara 691**
 Pengantar 691
 Undang-Undang Keuangan Negara 692
 Undang-Undang Perbendaharaan Negara 699
 Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan Negara 704
 Undang-Undang BPK 707
 Catatan Kaki 708
- BAB 25—Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang 709**
 Pengantar 709
 Undang-Undang 15/2002 710
 Undang-Undang 25/2003 712
 Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) 713
 Beberapa Konsep Penting 714
- BAB 26—Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 723**
 Pengantar 723
 Arbitrase 725
 Alternatif Penyelesaian Sengketa 727
 Mediasi 728
 Dading 729
 Perbandingan antara Arbitrase, Mediasi, Dading, dengan Litigasi 729
 Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) 730
 Arbitrase di Luar Negeri 732
 Catatan Kaki 733
Lampiran 735
- BAB 27—U.S. Foreign Corrupt Practices Act dan U.N. Convention Against Corruption 779**
 Pengantar 779
 Pembahasan mengenai FCPA 780

Komentar 784
 Kasus-kasus Indonesia 785
 Konvensi PBB Menentang Korupsi (disingkat
 UNCAC) 789

BAGIAN V—Penutup 797

**BAB 28—Penelusuran Aset dan
 Pemulihan Kerugian 801**

Pengantar 801
 Autokrat dan Kleptokrat 802
 Taksiran Nilai Jarahan 804
 STAR dalam Berita 805
 Pelajaran dari Kasus Marcos 806
 Bantuan untuk Penyelamatan Krisis
 Keuangan 1997 808
 Penelusuran Aset 827
 Pemulihan Kerugian 832
 Catatan Kaki 834

Lampiran 836

BAB 29—Perhitungan Kerugian 859

Pengantar 859
 Kerugian dan Perbuatan Melawan Hukum 860
 Beberapa Gagasan mengenai Kerugian 864
 Contoh-contoh Kasus 873
 Catatan Kaki 889

BAB 30—Kriminologi dan Viktimologi 893

Pengantar 893
 Kriminologi 894
 Penutup Bahasan mengenai Kriminologi 899
 Viktimologi 900
 Catatan Kaki 902

Daftar Pustaka D-1

Indeks I-1

- ACI Association of Certified Fraud Examiners
- AIG American International Group
- AJIP Anonim pada Dua Dilemma Prasad
- APRD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- APF Asosiasi Pengawasan Internal Perusahaan
- APU Aka Keuangan Uluog
- AOIA Asian Organization of Supreme Audit Institutions
- Austrak Australian Forensic Accounting Report and Audit Standards
- BANI Badan Adukar Nasional Indonesia
- BAPI Bank Aceh Paritohedra
- Berkada Badan Pengawasan Daerah
- BBQ Bank Bali Qorini
- BOCI Bank of Credit and Commerce International
- Bank Indonesia Bank Indonesia
- ETIM Ekonomi Uluog Bank Indonesia
- BUMU Badan Layanan Umum
- BCUA Bank Pembangunan Daerah
- BTM Bank Pembangunan
- CEKU Badan Pengembangan Keuangan